



**RENCANA KERJA PERUBAHAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET**  
**DAN INOVASI DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**2025**



**S A L I N A N**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
  - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
  - d. penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan rencana kerja (RENJA) Perubahan tahun 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan prioritas yang tertuang pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2024–2026 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Tanah Laut, juga dengan memperhatikan ketersediaan dana Pemerintah Daerah kabupaten Tanah Laut. Sebelumnya penyusunan Renja SKPD ini juga mengacu pada evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 sampai bulan Mei tahun 2025

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Tanah Laut yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Tanah Laut mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Pelaihari, Mei 2025

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TANAH LAUT,

ISMAIL FAHMI, SE, MT  
NIP. 19731128 199803 1 008



DAFTAR ISI	
	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1.1
1.1 Latar Belakang .....	1.1
1.2 Landasan Hukum .....	1.2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	1.6
1.4 Sistematika Penulisan .....	1.6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....	2.1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	2.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	2.13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	2.14
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	2.14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	3.1
3.1 Tela’ahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi .....	3.1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	3.4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	4.1
BAB V PENUTUP .....	5.1
LAMPIRAN .....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal Perubahan RKPD, renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal Perubahan RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal Perubahan RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan renja Perubahan SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bapperida, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD berdasarkan kepada ketersediaan dana Pemerintah Daerah. Renja SKPD ditetapkan



melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja Perubahan tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

- Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  28. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
  29. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
  33. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan



- Daerah Kabupaten Tanah Laut;
34. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 39 Tahun 2023, tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026
  35. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 43 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut 2024 – 2026;
  36. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi SKPD Bapperida Kabupaten Tanah Laut agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Bapperida;
- b. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang dalam penyusunan RKA SKPD Bapperida;
- c. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

#### BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

#### BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

### **BAB III. Tujuan, sasaran, Perangkat Daerah**

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD.

### **BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Berisikan rencana kerja tahun 2025, merupakan acuan pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

### **BAB V. Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Pada saat disusunnya Renja Bapperida Tahun 2025 ini, pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 masih berjalan, sehingga capaian realisasi renja Tahun 2025 sebesar ..... pada Bulan Mei 2025. Dalam konteks melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja ini juga dapat melihat pada realisasi sampai dengan akhir tahun 2024. Hal yang menjadi esensinya sejauh mana capaian sampai dengan tahun 2024 dan target apa yang akan dicapai pada tahun 2025, sehingga dapat direncanakan program/kegiatan untuk Perubahan tahun 2025 dengan memperhatikan kedua aspek tersebut, disamping ketersediaan dana Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut

Hasil kegiatan Bappeda Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan yang secara fisik dapat mencapai sebesar 100% . Hal ini dikarenakan terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2024 diuraikan pada tabel tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2024. Sedangkan secara singkat beberapa hasil kegiatan utama tahun 2025 dan realisasi tahun 2025 sampai dengan bulan Mei dapat diuraikan sebagai berikut :



LAPORAN REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
PER 31 MEI TAHUN 2025

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja Murni	Target Kinerja Perubahan	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Pagu Efisiensi (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%) Berdasarkan Pagu Perubahan	Keterangan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.656.684.412	14.315.095.730	14.027.471.206	3.782.723.640	26,42	
501	PERENCANAAN						12.289.711.576	13.632.259.011	12.742.681.556	3.769.418.640	27,65	
BAGIAN SEKRETARIAT												
50101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat Bappeda	95 nilai	90 nilai		30,16	10.356.704.387	11.404.483.392	11.201.284.067	3.460.738.873	30,35	
50101201	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		57,50	11.999.273	38.692.889	11.999.273	2.165.000	5,60	

501012010001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	0 dokumen	2 dokumen/ proses	55,00	6.999.531	7.892.957	6.999.531	1.625.000	20,59	Msh dlm tahap penyelesaian penyusunan dok Renstra, RKA 2026 & RKAP 2025
501012010007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	3 laporan/ proses	60,00	4.999.742	30.799.932	4.999.742	540.000	1,75	Msh dlm tahap evaluasi laporan
50101202	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		45,00	7.158.019.599	7.294.357.285	8.486.229.279	2.787.350.469	38,21	
501012020001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 org/ bln	36 org/ bln	44 org/ bln	39,29	7.145.870.646	7.286.357.690	8.474.080.326	2.785.402.869	38,23	Adany penambahan PPPK & CPNS, realisasi Juni dlm tahap pengamprahan
501012020003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	3 dokumen/ proses	45,00	12.148.953	7.999.595	12.148.953	1.947.600	24,35	Msh dlm tahap SPJ utk blja cetak penyusunan laporan keuangan yg dilakukan per bulan, TW, semesteran & tahunan
50101205	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%		0,00	612.906.500	118.200.000	612.906.500	0	0,00	

501012050002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 paket	99 paket	-	0,00	37.906.500	22.200.000	37.906.500	0	0,00	Mengurangi Volume menyesuaikan dengan jumlah ASN
501012050009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	99 orang	16 orang	-	0,00	575.000.000	96.000.000	575.000.000	0	0,00	Akan dilaksanakan pd TW III stlh DPA P krn adanya perubahan rek Belanja utk kegiatan Diklat Renstra
50101206	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		33,08	1.536.894.211	2.918.494.428	1.053.264.211	421.151.692	14,43	
501012060001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket/ proses	30,00	24.900.342	24.900.342	24.900.342	4.805.980	19,30	Masih Proses Realisasi
501012060002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	13 paket	1 paket/ proses	20,00	332.584.092	332.584.092	332.584.092	28.591.700	8,60	dlm proses pengadaan, blm perealisasi angggaran, (2) adanya penyesuaian harga satuan pd item belanja krn tdk sesuai dg harga pasar
501012060003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket/ proses	25,00	31.426.032	31.426.032	31.426.032	4.629.700	14,73	Masih Proses Realisasi

501012060005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4 paket	1 paket/ proses	48,00	44.985.687	44.985.687	44.985.687	18.383.000	<b>40,86</b>	Masih Proses Realisasi
501012060006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dok/ proses	41,67	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.250.000	<b>41,67</b>	Masih Proses Realisasi
501012060007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 paket	1 paket	-	0,00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	<b>0,00</b>	Jadwal tala Expo dan Anggrek
501012060009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	350 laporan	30 laporan	65,00	1.080.000.000	2.461.600.217	596.370.000	362.169.312	<b>14,71</b>	
501012060010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen/ proses	35,00	4.998.058	4.998.058	4.998.058	1.322.000	<b>26,45</b>	Masih Proses Realisasi
50101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		0,00	119.146.014	117.000.000	119.146.014	0	<b>0,00</b>	
501012070005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	31 unit	12 laporan	-	0,00	119.146.014	117.000.000	119.146.014	0	<b>0,00</b>	Pergeseran di perubahan
50101208	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		41,67	507.168.010	507.168.010	507.168.010	171.292.712	<b>33,77</b>	



501012080002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	5 laporan	41,67	200.000.000	200.000.000	200.000.000	50.108.368	25,05	
501012080004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	5 laporan	41,67	307.168.010	307.168.010	307.168.010	121.184.344	39,45	
50101209	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		33,88	410.570.780	410.570.780	410.570.780	78.779.000	19,19	
501012090001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit/ proses	42,00	37.500.000	37.500.000	37.500.000	13.421.000	35,79	
501012090002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	22 unit	20 unit/ proses	37,50	114.293.640	114.293.640	114.293.640	33.558.000	29,36	
501012090006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 unit	75 unit	23 unit/ proses	56,00	64.827.500	64.827.500	64.827.500	31.800.000	49,05	
501012090009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1 unit	-	0,00	137.290.189	137.290.189	137.290.189	0	0,00	Masih Tahap Proses Perencanaan

501012090011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	-	0,00	56.659.451	56.659.451	56.659.451	0	0,00	Masih Tahap Proses Perencanaan
<b>BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH</b>												
50102	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD	77% 100%	77% 100%		36,67	1.417.879.534	1.423.065.501	1.263.054.472	256.169.767	18,00	
50102201	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	Persentase Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	100%	100%		60,00	1.221.058.796,59	1.289.885.501,00	1.088.113.734,59	245.119.767	19,00	
501022010007	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	60,00	1.221.058.796,59	1.289.885.501	1.088.113.735	245.119.767,00	19,00	Masih proses Penyusunan RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029
50102203	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%		50,00	196.820.737	133.180.000	174.940.737	11.050.000	8,30	
501022030003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	9 Laporan	2 Laporan	50,00	196.820.737	133.180.000	174.940.737	11.050.000	8,30	Belum dilaksanakannya ekspose money Semester I dan money fisik

50103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1 Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia2 Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)3 Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia4 Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan5 Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)6 Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	78%78%100%78%100%100 %	77%77%100%77%100%100 %		13,89	515.127.656	804.710.118	278.343.018	52.510.000	6,53	
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGEMBANGAN MANUSIA												
50103201	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%		5,00	112.837.512	410.918.604	98.974.102	4.950.000	1,20	
501032010001	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJM dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	2 dokumen	-	0,00	16.732.720	7.999.114	16.149.486	0	0,00	Kegiatan pendampingan penyusunan RKPD SKPD pokja PPM baik murni dan Perubahan mengikuti jadwal dari kegiatan Bidang P2EPD dan konsumsinya ditanggung di Bidang P2EPD

501032010003	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6 laporan	2 laporan	-	0,00	14.949.672,00	12.427.342	10.400.652	0	0,00	Kegiatan monev dilaksanakan dilaksanakan persemester, rencananya untuk tahap I dilaksanakan di Bulan Juni 2025
501032010005	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJM dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yangDikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	2 dokumen	1 dok/ proses	20,00	54.228.800,00	354.142.260	53.271.740	4.950.000	1,40	Kegiatan pendampingan penyusunan RKPD SKPD pokja PPM baik murni dan Perubahan mengikuti jadwal dari kegiatan Bidang P2EPD dan konsumsinya ditanggung di Bidang P2EPD, Kemudian untuk Penyusunan RPKD menunggu disahkannya RPJMD 2025-2029 sebab RPKD dokumen turunan dari RPJMD
501032010007	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	2 Laporan		0,00	26.926.320,00	36.349.888	19.152.224	0	0,00	Kegiatan monev dilaksanakan dilaksanakan persemester, rencananya untuk tahap I dilaksanakan di Bulan Juni 2025
<b>BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM</b>												
50103202	<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)</b>	<b>Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>26,25</b>	<b>93.751.340</b>	<b>77.434.083</b>	<b>68.822.968</b>	<b>30.010.000</b>	<b>38,76</b>	



501032020001	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	2 dokumen	1 dok/ proses	60,00	51.644.738,00	42.995.598	48.951.794	27.310.000,00	<b>63,52</b>	kegiatan pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan bid perekonomian, rapat koordinasi persiapan refleksi dan keberlanjutan program YESS di kab Tanah Laut, rapat koordinasi penyusunan perencanaan program kegiatan pengendalian inflasi daerah tahun 2026, FGD penyusunan perencanaan bidang perekonomian
501032020003	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	1 Laporan	-	0,00	13.707.290,00	15.458.495	7.901.458	<b>0</b>	<b>0,00</b>	Telah dilaksanakan movev TW I pada tanggal 22 Mei 2025 realisasi keuangan dalam proses pencairan
501032020005	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	2 dokumen	1 dok/ proses	45,00	21.139.938,00	7.981.990	7.528.258	2.700.000	<b>33,83</b>	telah dilaksanakan rapat koordinasi sinergitas pelaksanaan tahun 2025 dan perencanaan skpd thn 2026, rapat koordinasi perumusan RIRU (data investasi daerah). 3 kegiatan masih dalam pembayaran (SPJ) dan FC.
501032020007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	1 Laporan	-	0,00	7.259.374,00	10.998.000	4.441.458	<b>0</b>	<b>0,00</b>	kegiatan movev di TW I belum di laksanakan dan pada SKPD baru proses administrasi kegiatan, kami akan melaksanakan di TW.II
<b>BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>												

50103203	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%		10,42	308.538.804	316.357.431	110.545.948	17.550.000	5,55	
501032030001	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dok/ proses	16,67	23.098.388,00	21.499.053	20.848.388	1.575.000	7,33	Rapat koordinasi kegiatan SKPD Pokja masih belum terlaksana karena ada SK Tim yang masih belum selesai (masih berproses di bagian hukum)
501032030003	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	-	0,00	162.780.416,00	18.568.278	8.102.560	0	0,00	Kegiatan monev belum dilaksanakan karena banyak pekerjaan fisik yang dilakukan skpd teknis dan biasanya dimulai pada akhir triwulan kedua atau ketiga> rencana Monev akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2025
501032030005	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen/ proses	25,00	106.260.000,00	237.550.000	73.995.000	15.975.000	6,72	Rapat koordinasi sudah terlaksana 2x Ada SPJ yang sedang dalam tahap pencairan
501032030007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	-	0,00	16.400.000,00	38.740.100	7.600.000	0	0,00	Kegiatan belum dapat dilaksanakan dikarenakan pekerjaan fisik SKPD belum terlaksana, rencana akan dimulai monitoring pada bulan Juli/Agustus
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												

505	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
50502	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Inovasi Daerah Yang Nilai Kematangannya Minimal 100	3 Inovasi	75%		7,50	1.366.972.836	682.836.719	1.284.789.650	13.305.000,00	1,95	
50502201	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	Persentase Capaian Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	100%	100%		10,00	803.948.898	380.964.518	777.933.898	1.125.000	0,30	
505022010005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 laporan	1 laporan	-	0,00	93.468.898	73.449.518	76.853.898	0	0,00	pelaksanaan kegiatan direncanakan pada tw 3 (IPKD) & mengikuti pelaksanaan kegiatan hari jadi (pelaporan hari jadi kabupaten)
505022010012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3 laporan	1 laporan	proses	20,00	710.480.000	307.515.000	701.080.000	1.125.000	0,37	pelaksanaan kajian potensi event sudah tanda tangan kontrak, dan mulai tahap pengumpulan data (pembayaran dilakukan pada akhir pelaksanaan kajian. pelaksanaan kajian grand desain kota pelaihari masih ditahap penandatanganan & pemparafan PKS
50502204	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	Persentase Capaian Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	100%		5,00	563.023.938	301.872.201	506.855.752	12.180.000	4,03	

505022040004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	1 Laporan	1 laporan/ proses	10,00	474.242.980	244.546.457	435.859.588	12.180.000	4,98	pelaksanaan kegiatan direncanakan pada tw 3, mengikuti rangkaian hari jadi kabupaten
505022040005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	-	0,00	88.780.958	57.325.744	70.996.164	0	0,00	pendaftaran HAKI terhadap inovasi pemenang lomba inovasi masih dalam proses pengajuan ke kemenkumham wilayah kalsel



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor **36 Tahun 2009** tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Tugas Pokok BAPPERIDA Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor **36 Tahun 2009** tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BAPPERIDA Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia ;
- c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian dan SDA ;
- d. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan Kewilayaan ;
- e. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi di bidang pengendalian, penelitian, pengembangan serta pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah ;
- g. Pengkoordinasian dalam riset dan inovasi daerah
- h. dan pengelolaan urusan kesekretariatan.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Bapperida tidak memiliki aturan mengenai SPM. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan. Selama ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Tanah Laut. Baik dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kabupaten secara internal maupun dokumen sebagai pelaporan kepada pemerintah atasan.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja perencanaan pembangunan. (Nilai SAKIP Kabupaten)
2. Belum integrasinya pengelolaan system perencanaan dan evaluasi.
3. Belum optimalnya nilai sakip bapperida.
4. Belum optimalnya penyelenggaraan riset dan inovasi.

### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Bapperida merupakan SKPD yang mengkoordinir kegiatan perencanaan lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Usulan kegiatan hasil musrenbang desa yang kemudian dilanjutkan dalam musrenbang kecamatan akan diteruskan ke SKPD dalam rangka penyempurnaan Rancangan Renja SKPD. Fungsi Bappeda adalah mengawal prioritas hasil musrenbang RKPD di Kecamatan yang telah disetujui oleh SKPD untuk dilaksanakan pada Tahun 2024 agar dimasukkan dalam Rancangan Renja SKPD dan menjadi salah satu bahan penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025. Dengan demikian untuk usulan langsung dari masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Bapperida adalah terkait dengan perlunya dilakukan inovasi dan improvisasi agar kegiatan musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan dapat lebih optimal hasilnya.

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi**

Dalam penyusunan Renja Perubahan Bapperida Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Perubahan Bapperida Tahun 2025 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi,  
Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2025

Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab. Tanah Laut	Program dalam Renja 2025
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1. Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataaan	2. Optimalisasi Sektor Industri, Umkm, Pertanian Dan Pariwisata	2. Peningkatan Kualitas SDM, Akuntabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2. Program perencanaan, Pengendalian Dan evaluasi pembangunan Daerah
3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan	3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan	3. Pemantapan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah
			4. Program Penelitian dan Pengembangan daerah

Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab. Tanah Laut	Program dalam Renja 2025
Berdaya Saing	Dasar Dan Pengembangan		
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perekonomian Daerah		
	4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik		
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana		
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6. Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara Dan Sebagai Pendukung Food Estate		
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran 2025	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kinerja pembangunan Daerah		Persentase Sasaran Daerah yang memenuhi Target	70		Penguatan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah yang Terintegrasi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten komponen Perencanaan	24	Meningkatkan Nilai SAKIP (Komponen Perencanaan dan pengukuran)	
	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sasaran Perangkat Daerah Yang Memenuhi Target	60		
	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Inovasi Daerah	55,80	Meningkatkan Kuantitas Riset dan Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	

4.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan RPD yaitu “**Peningkatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**”. Dalam hal ini Bapperida merupakan SKPD yang mendukung dalam peningkatan sistem pelayanan kegiatan perencanaan dan mendukung partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan.



Tabel 3.3.

Sasaran Bapperida Tanah Laut Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kinerja pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan Nilai SAKIP (Komponen Perencanaan dan pengukuran)	Penguatan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah yang Terintegrasi
	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah		
	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kuantitas Riset dan Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	

Sesuai dengan tupoksinya Bapperida mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, Riset dan penelitian pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, Riset dan penelitian pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, Riset dan penelitian pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pembinaan UPT Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber

- daya alam, sosial budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan penelitian dan pengembangan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang Nasional;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Nasional;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah;
  - e. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam;
  - f. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial dan sumber daya alam ;
  - g. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - h. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang formasi dan pengadaan aparatur;
  - i. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidangpenjenjangan karier dan fasilitasi profesi aparatur;
  - j. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

SKPD	
<b>3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
<b>4 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6	Penyediaan Bahan/Material
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
1	Pengadaan Mebel
<b>6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>
	1	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>
	1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	2	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan BidangPerencanaan Pembangunan Daerah</b>
	1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
	1	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	2	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA (Sumber Daya Alam)</b>
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMDdan RKPD)
	2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
<b>3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
<b>4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	
1	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
<b>2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	
1	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
2	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Dari pelaksanaan 4 (empat) program, 14 (Empat belas) Kegiatan dan 40 (Empat Puluh) Sub Kegiatan tersebut di atas kebutuhan dana indikatif adalah sebesar Rp. 15.665.790.175,39,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah)

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Bapperida.

Pendanaan daerah untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut 2025.



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2025

Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Tanah Laut

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kependagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
										APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5																				
5						1					13.510.182.037,80	15.665.790.175,39	2.155.608.137,59							
5						1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat Bappeda	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	10.356.704.386,61	12.566.580.613,30	2.209.876.226,69	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Nilai	11,433,963,044
5						1	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	11.999.273,00	11.999.273,00	0,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persen	32,000,000
5						1	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6.999.531,00	6.999.531,00	0,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	ATK, Fotocopy, Penjilatan dan Cetak dokumen(RKA, RKAP, RENJA, RENJA P, DPA, DPAP)	6 Dokumen	16,000,000
5						1	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	4.999.742,00	4.999.742,00	0,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Fotocopy dan penjilatan Laporan (sakip, lakip, lkpj, rb, Emonev)	5 Laporan	16,000,000
5						1	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	7.158.019.599,00	8.486.229.279,00	1.328.209.680,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persen	8,532,961,225

5	1	1	20 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Orang/bulan	7.145.870.646,00	8.474.080.326,00	1.328.209.680,00	SISA LEBIH PERHITUNGA N ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Gaji, Tunjangan, BPJS, JKK, JKM, Tapera ASN	36 Orang/ Bulan	8,517,961,225
5	1	1	20 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	12.148.953,00	12.148.953,00	0,00	SISA LEBIH PERHITUNGA N ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Kertas dan Cover (Lap. Kinerja dan keuangan, Lap. TW, lap. Semesteran, CALK, Laporan Bendahara Alat Tulis Kantor Benda Pos	5 Dokumen	15,000,000
5	1	1	20 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	612.906.500,00	610.575.500,00	-2.331.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGA N ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persen	160,000,000
5	1	1	20 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Paket	37.906.500,00	35.575.500,00	-2.331.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGA N ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Seragam Sasirangan	36 Paket	40,000,000
5	1	1	20 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99 Orang	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00	SISA LEBIH PERHITUNGA N ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Belanja Bimtek Pegawai	16 Orang	120,000,000
5	1	1	20 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1.536.894.211,00	2.458.888.135,34	921.993.924,34	SISA LEBIH PERHITUNGA N ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persen	1,511,420,819
5	1	1	20 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	24.900.342,00	24.900.342,00	0,00	SISA LEBIH PERHITUNGA N ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Alat Listrik, Lampu dan Baterai	1 Paket	34,976,000
5	1	1	20 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Paket	332.584.092,00	733.591.965,04	401.007.873,04	SISA LEBIH PERHITUNGA N ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	ATK, Bahan komputer, Umbul - Umbul, Spray engine (1), Laptop (2), Printer (2), Pc (6), scanner (1), UPS (5), Penghancur kertas (1)	1 Paket	332,657,819
5	1	1	20 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan,	1 Paket	31.426.032,00	31.426.032,00	0,00	SISA LEBIH PERHITUNGA N ANGGARAN	Perabot Kantor (ember, pel, cairan pembersih dll)	1 Paket	20,000,000

							Semua Kel/Desa					TAHUN SEBELUMNYA			
5	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	44.985.687,00	46.854.488,30	1.868.801,30	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	ATK (Cetak, fotocopy), Stiker inventarisasi barang, Papan nama (20), Banner/ Spanduk(20)		75,787,000
5	1	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Majalah, Surat kabar	1 Dokumen	3,000,000
5	1	1	206	7	<u>Penyediaan Bahan/Material</u>	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	15.000.000,00	17.747.250,00	2.747.250,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Material Tala expo dan Orchid Show, Karangan Bunga (8)	2 Paket	30,000,000
5	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Laporan	1.080.000.000,00	1.596.370.000,00	516.370.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Makan Minum dan Perjalanan Dinas	200 Laporan	1,000,000,000
5	1	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.998.058,00	4.998.058,00	0,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Fotocopy, Cetak, Penjilidan	1 Dokumen	15,000,000
5	1	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	119.146.013,61	92.699.580,96	-26.446.432,65	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persen	0
5	1	1	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59 unit	119.146.013,61	92.699.580,96	-26.446.432,65	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 Paket	0
5	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	507.168.010,00	490.068.065,00	-17.099.945,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persen	615,902,000

5	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Belanja Tagihan Telepon, Air dan Listrik (Laporan Tagihan per bulan)		187,067,000
5	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	307.168.010,00	290.068.065,00	-17.099.945,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Honor PTT, (BPJS, JKK, JKM) PTT, Tenaga Ahli/Tim publikasi	12 Laporan	428,835,000
5	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	410.570.780,00	416.120.780,00	5.550.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persen	581,679,000
5	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Pemeliharaan Mobil Kaban	1 Unit	60,000,000
5	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	114.293.640,00	114.293.640,00	0,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	BBM Roda 4 (6) dan Roda 2 (14), Pemeliharaan kendaraan Roda 2	25 Unit	185,000,000
5	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Unit	64.827.500,00	70.377.500,00	5.550.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Pemeliharaan AC (24), Solar cell, Videotron, Genset (2), Komputer/ Laptop (10) dan Printer (10)		136,679,000
5	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	137.290.189,00	137.290.189,00	0,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Pemeliharaan Gedung/ Kantor (taman), Rehab atap, Plafon & instalasi Listrik	3 Unit	150,000,000
5	1	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	56.659.451,00	56.659.451,00	0,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Rehab Parkir kantor	1 Unit	50,000,000
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 Persentase 100 Persentase	1.417.879.533,59	1.170.418.671,59	-247.460.862,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		79 Persentase 100 Persentase	825,000,000

5	1	2	201		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persentase	1.221.058.796,59	995.477.934,59	-225.580.862,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persentase	500,000,000
5	1	2	201	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/ RK	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1.221.058.796,59	995.477.934,59	-225.580.862,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	ATK, Cetak buku profil Tanah Laut, SUVENIR /CENDERA MATA, MAKAN MINUM, DEKORASI, SEWA GEDUNG, PERDIN HONOR TIM DAN NARSUM (Dokumen RKPD murni dan RKPD Perubahan, RPJMD Teknokratif)	2 Dokumen	500,000,000
5	1	2	202		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-		0,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persentase	150,000,000
5	1	2	202	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	-	0,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Jasa Konsultasi ASB(Analisis Skandal Belanja)	1 Dokumen	150,000,000
5	1	2	203		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Pengendalian , Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	196.820.737,00	174.940.737,00	-21.880.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persen	175,000,000
5	1	2	203	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	196.820.737,00	174.940.737,00	-21.880.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	ATK, Cetak dokumen Monev, Sewa Hosting, Makan Minum, Dekorasi, Sewa Gedung, PERDIN Honor Tim da Narsum, Laporan DAK (4), EMONEV APBD (4)	9 Laporan	175,000,000

5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Capaian Program Yang Memenuhi Target Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Kesesuaian Program RPD Dengan RKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78 Persentase 78 Persentase 78 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase	368.625.281,60	380.092.874,00	11.467.592,40	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		79 Persentase 79 Persentase 79 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase	306,450,000
5	1	3	201		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	112.837.512,00	177.474.102,00	64.636.590,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persen	116350000
											0,00				
5	1	3	201	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	16.732.720,00	16.149.486,00	-583.234,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Fotocopy, Cover, Cetak Dokumen Rapat Koordinasi (2) dan Makmin Rapat	2 Dokumen	14,000,000
5	1	3	201	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	14.949.672,00	10.400.652,00	-4.549.020,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Fotocopy, Cetak Laporan movev 6 SKPD, Cover, Makmin Rapat dan Perjadin	6 Laporan	20,000,000
5	1	3	201	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	54.228.800,00	53.271.740,00	-957.060,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Fotocopy, Cetak, Makmin Rapat, Pembuatan Dokumen Rencana penanggulangan kemiskinan daerah dan Dokumen koordinasi SDM (2)	2 Dokumen	35,000,000



5	1	3	201	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	26.926.320,00	97.652.224,00	70.725.904,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Fotocopy, Cetak, Laporan Monev 6 SKPD, Cover, Makmin Rapat dan Perjadin	6 Laporan	47,350,000
5	1	3	202		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	93.751.340,00	79.322.824,00	-14.428.516,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persen	47,500,000
5	1	3	202	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	51.644.738,00	59.451.650,00	7.806.912,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Fotocopy, Jilid, Makmin Rapat, Fasilitasi bidang perekonomian dan makmin Rapat koordinasi perencanaan bidang perekonomian (Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan yang dikoordinir)	3 Dokumen	10,000,000
5	1	3	202	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	13.707.290,00	7.901.458,00	-5.805.832,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Fotocopy, Penjiliran, Makmin Rapat Monev dan Perjadin dalam rangka koordinasi dan monev (Laporan monev)	1 Laporan	18,000,000

5	1	3	202	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.139.938,00	7.528.258,00	-13.611.680,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Fotocopy, Jilid, Makmin Rapat, Fasilitasi bidang perekonomian dan makmin Rapat koordinasi perencanaan bidang SDA (Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan yang dikoordinir)	3 Dokumen	8,500,000
					dan RKPd)						0,00				
5	1	3	202	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	7.259.374,00	4.441.458,00	-2.817.916,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Fotocopy, Penjilidan, Makmin Rapat Monev dan Perjadin dalam rangka koordinasi dan monev (Laporan monev)	1 Laporan	11,000,000
5	1	3	203		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	162.036.429,60	123.295.948,00	-38.740.481,60	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persen	142,600,000
5	1	3	203	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	23.098.388,00	20.848.388,00	-2.250.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Fotocopy, Makmin Rapat, Dokumen hasil pelaksanaan rapat koordinasi	1 Dokumen	11,000,000
5	1	3	203	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	16.278.041,60	8.102.560,00	-8.175.481,60	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Fotocopy, Perjadin, Laporan hasil pelaksanaan monev	1 Laporan	11,400,000

5	1	3	203	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	106.260.000,00	86.745.000,00	-19.515.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Fotocopy, Makmin Rapat, Dokumen hasil pelaksanaan rapat koordinasi	1 Dokumen	25,200,000
5	1	3	203	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	16.400.000,00	7.600.000,00	-8.800.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Perjalanan Dinas, Laporan hasil pelaksanaan Monev	1 Laporan	95,000,000
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				,						
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Inovasi Daerah Yang Nilai Kematangannya Minimal 100	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Inovasi	1.366.972.836,00	1.548.698.016,50	181.725.180,50	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		3 Inovasi	217,000,000
5	5	2	201		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Capaian Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	803.948.898,00	1.034.868.898,00	230.920.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persen	80,000,000
5	5	2	201	5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	93.468.898,00	67.503.898,00	-25.965.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Cetak, Makmin Rapat, Honor Tim, Perjadin	1 Laporan	40,000,000
5	5	2	201	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	710.480.000,00	967.365.000,00	256.885.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Cetak, Makmin Rapat, Honor Tim, Perjadin	1 Laporan	40,000,000
5	5	2	204		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Capaian Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	563.023.938,00	513.829.118,50	-49.194.819,50	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persen	137,000,000
5	5	2	204	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	474.242.980,00	479.429.118,50	5.186.138,50	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	ATK, Penjilitan, Cetak, Makmin Rapat, Honor Tim, Perjadin, dan Honor Narsum, pengembangan aplikasi	1 Laporan	82,000,000

5	5	2	204	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	88.780.958,00	34.400.000,00	-54.380.958,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	ATK, Makmin Rapat, Honor Narsum, Perjadin, Honor Tenaga Ahli	1 Laporan	55,000,000
									13.510.182.037,80	15.665.790.175,39	2.155.608.137,59				12,782,413,044

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan RPD yaitu **“Peningkatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”**.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam RPD Kabupaten Tanah Laut 2024-2026.

Pagu indikatif yang terdapat dalam Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut disusun dengan memperhatikan ketersediaan dana Daerah untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut.

**Kepala Bappeda**

**ISMAIL FAHMI, SE, MT**  
**NIP.19731128 199803 1 008**